

Laporan Badan Kepegawaian Daerah Bulan Juni Tahun 2021

NO	NAMA	LAPORAN	TANGGAPAN	STATUS
1	Bambang sulistyo hadi (Hadisxxxxxxxx)	<p>Mohon pencerahan. .bpk sy pns diberhentikan sementara udah 20an tahun lebih sampai skg belum jelas keterangannya, disuruh kesana kesini ngambang hasilnya dan skg beliau skit stroke. .apakah ini bisa diurus apa enggak nggih?</p>	<p>diteruskan ke bidang yg menanganimohon maaf PNS dimana nggih? mungkin dpt disampaikan ke nomor WA 08112777346</p>	Laporan Selesai
2	Sekar Andini (Sekarxxxxxxxx)	<p>Selamat sore Pak Ganjar. Mohon ijin pak, saya ingin melaporkan rasa keberatan saya sebagai cpns yg ditarik iuran koperasi sebesar 690.000 di awal dan 390.000 setiap bulan. Saat ini suami saya sedang tidak bekerja karena terdampak pandemi tentu hal ini sangat terasa pak jika setiap bulan gaji saya harus dipotong sebanyak itu belum lagi iuran ini itu pak. Walaupun iuran 390.00 balik lagi ke kami nantinya seperti 200.000 itu iuran untuk THR, tapi apakah harus diwajibkan pak? Mengingatkan ASN juga nantinya dapat THR kenapa harus dobel2 dan diwajibkan. Mohon kebijakan bapak untuk masalah ini.</p>	<p>diteruskan bidang yg menanganimohon dpt disampaikan ke No 08112777346 PNS dimana?</p>	Laporan Selesai

3	SEKAR ANDINI BUDI PRAMUSTIAR (Sekarxxxxxxxx)	<p>Selamat pagi Pak Ganjar. Saya ingin bertanya pak, apakah pns atau cpns itu diwajibkan menjadi anggota koperasi? Karena saya keberatan pak posisi sebagai cpns tapi diwajibkan mengikuti koperasi dan membayar iuran pertama 690.000 dan berikutnya 390.000 setiap bulan. Sementara suami saya menganggur karena terdampak pandemi. Dengan potongan 390.000 saya rasa itu memberatkan saya pak. 390.000 itu termasuk iuran 200.000 untuk THR padahal jelas2 ASN sudah mendapat THR tetapi kenapa diharuskan iuran pak? Belum lagi membayar iuran2 lainnya setiap bulan. Mohon pak kebijakannya agar dari pihak UPT tidak memaksakan keanggotaan kami di koperasi, kalau kami menyampaikan secara langsung pastinya akan berdampak kepada kami jika</p>	<p>terimakasih informasinya, dikoordinasikan dengan instansi anda nggihMonggo SDH saya teruskan ke pejabat Disdik nggih, tindaklanjuti kewenangan disana, matursuwun</p>	Laporan Selesai
---	---	--	--	-----------------

		ingin mengurus ini itu di UPT takutnya dipersulit pak.		
4	Saksono Wibowo (erlanxxxxxxxx)	Yth: Gubernur Jawa tengah Bpk. H. Ganjar Pranowo Istri saya N a m a : Puji Murwati (almh) TTL : Pati, 23- 04-1962 Pekerjaan: PNS (Guru SMA N 2 Pati, Matematika) Pada hari Jum'at, tgl 19 Juni 2020, tahun lalu meninggal dunia sebagai PNS Aktif, dua bulan kemudian saya telah menerima uang Taspen dari PT TASPEN Cab. Semarang. Sedangkan SK Pensiun Duda sampai saat ini hari Kamis, tgl 26 Mei 2021 (11 bulan sejak	terimakasih laporan diteruskan ke bidang yg menanganihasil telusur kami dapat kami informasikan bahwa: 1. data tersebut masuk ke BKD tgl 15 April 2021 2. Dari BKD kami terus kan ke Kanreg I BKN Jogja tgl 21 April 2021. 3. setelah dilakukan pengecekan sd hari ini Pertek dari BKN belum tyrun sehingga belum dapat dicetak demikian penjelasan kami terimakasih	Laporan Selesai

5	Suryadi (No Telepon)	<p>Alamat: Kabupaten Semarang, Kecamatan Genuk, Kelurahan Karangroto</p> <p>Laporan: MOHON DITERTIBKAN KANTOR DINAS PEMDA-JATENG YANG MELANGGAR HIMBAUAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID, CONTOHNYA MENIADAKAN WFH (COBA DICEK SATU-SATU KHUSUSNYA DINAS-DINAS YANG DULU STRATEGIS SEMISAL BAPPEDA, INSPEKTORAT, BPPD, DLL</p>	<p>diteruskan ke bidang yg menangani nggihTerkait dg laporan bapak/ibu mohon diberikan data yang jelas, atas nama siapa yg menolak di tracking, sehingga kita bisa memberikan masukan/teguran jika terjadi hal tsb. Terkait dg perjalan dinas hingga saat ini blm ada larangan terkait melakukan perjalanan dinas, asal pimpinan mengijinkan dan memang tingkat kebutuhan organisasi membutuhkan perjalanan dinas tersebut tidak masalah. Sehingga perjalanan dinas tidak semata2 demi</p>	Laporan Selesai
6	puguh (No Telepon)	<p>Alamat: Kabupaten sragen/sragen, Kecamatan sragen, Kelurahan nglorog</p> <p>Laporan: ijin bertanya apakah di dalam struktur pemerintahan ada jual beli jabatan</p>	<p>diteruskan ke yang menangani Apabila ada bukti bukti dapat diteruskan ke kami BKD Jateng untuk diteruskan ke Inspektorat , atau anda langsung ke Inspektorat kab sragen ke bkd@jatengprov.go.id</p>	Laporan Selesai
7	Herry Arsandi (herryxxxxxxxx)	<p>pak gub, mau bertanya apakah cpns jateng tahun ini tidak dapat tpp? kasihan pak anak saya diluar kota tabungan semakin menipis, untuk makan sehari2 sudah kesusahan. mohon dipertimbangkan untuk diberikan pak mengingat posisi masih korona, matur nuwun</p>	<p>terimakasih diteruskan ke bidang yg menangani Berdasarkan ketentuan pasal 2 peraturan gubernur nomor 15 tahun 2019 jo pergub 51 tahun 2020 bahwa CPNS tidak termasuk sasaran yang mendapatkan TPP, sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan ketentuan yang ada memang cpns tidak berhak mendapatkan TPP, dan akan memperoleh ketika sdh diangkat menjadi PNS ðŸ™ ðŸ™</p>	Laporan Selesai